

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah yang pokok. Permasalahan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia yaitu terkait pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan permasalahan sampah. Permasalahan sampah merupakan persoalan yang kompleks. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan hidup dan kesehatan. Permasalahan terkait pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang umum di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Tak bisa dipungkiri bahwa permasalahan sampah di Kota Semarang terus meningkat diakibatkan karena dampak negatif dari faktor jumlah penduduk yang padat yaitu sekitar 1,6 juta jiwa, pesatnya pembangunan, menjadi salah satu kota perdagangan yang besar, serta potensi kota wisata. Maka dari itu itu, permasalahan sampah memiliki kaitan yang erat dengan kegiatan dan pola hidup manusia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin kompleks pula kegiatan dan usahanya, sehingga semakin besar masalah persampahan yang harus ditanggulangi (Basri Durin H, 1985).

Persoalan sampah plastik merupakan masalah yang paling kompleks dan berpotensi untuk mencemari lingkungan. Mengingat bahwa plastik memiliki sifat yang sulit untuk terurai di tanah karena mencapai waktu lebih dari 20 tahun

bahkan sampai dengan 100 tahun. Penggunaan plastik yang terus meningkat juga menjadi salah satu penyebab peningkatan volume sampah plastic dari tahun ke tahun. Sekitar 79% sampah plastik yang terakumulasi pada pembuangan sampah dan di alam, hanya sekitar 9% yang telah didaur ulang, sedangkan 12% lagi dimusnahkan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019, presentase komposisi sampah plastik di Indonesia semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan volume sampah semakin meningkat sehingga jasa pelayanan persampahan menjadi sangat strategis sehingga dapat diperkirakan akan terus bertambah. Volume sampah akan terus meningkat apabila terdapat pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan teknologi dan aktivitas sosial ekonomi dari masyarakat (Slamet, 1994).

Jika diteliti lebih jauh, kawasan Asia menjadi wilayah produksi sampah terbanyak di dunia. Dimana 50% dari keseluruhan sampah plastik yang ada dilautan merupakan negara China, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka. Dari data tersebut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia. Berdasarkan riset dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS), disebutkan bahwa Indonesia memproduksi sampah plastic sejumlah 64 juta ton per tahunnya. Hal yang sangat disayangkan yaitu 3,2 juta ton sampah plastic dibuang ke lautan. Komposisi sampah yang dihasilkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 60.79% organik dan 39.21% anorganik. Apabila dikalkulasikan dengan penduduknya yang berjumlah 1.680.417 jiwa, maka diperoleh sekitar kurang lebih 1.200 ton sampah per harinya. Jumlah tersebut

sangat tinggi, dan apabila dibiarkan, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru lainnya seperti kerusakan ekologi, banjir, dan sumber penyakit (Artiningsih dkk, 2012).

Kota Semarang yang memiliki kepadatan penduduk mempunyai TPA terbesar di Jawa Tengah, yaitu TPA Jatibarang. Permasalahan sampah plastik di Kota Semarang semakin hari menjadi parah dan kompleks. Tingginya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menjadikan Kota Semarang sebagai penghasil sampah terbesar di Jawa tengah. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan dikhawatirkan TPA Jatibarang akan *overload* dalam jangka waktu 10 tahun, mengingat luasnya hanya 46 hektar. Padahal TPA Jatibarang hanya bisa menampung 850 ton sampah dan 15% sisanya dikelola oleh 50 bank sampah yang berada di Kota Semarang. Pengelolaan sampah di Kota Semarang pada dasarnya telah menerapkan konsep 3R sejak tahun 1992 dengan menyediakan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jatibarang. Tetapi upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola sampah nyatanya masih belum bisa mengatasi permasalahan sampah.

Tabel 1.1
Jumlah Pengeluaran Sampah Plastik Nasional

Tahun	Presentase Jumlah Sampah Plastik
2018	26%
2019	16%
2020	17,22%
2021	18,12%
2022	18,29%

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, 2022

Sedangkan jumlah pengeluaran sampah plastik di Kota Semarang dari tahun 2019 sampai dengan 2022 konsisten pada 17,2%. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat permasalahan lingkungan yang dinilai serius diakibatkan karena sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik, terutama sampah plastik (Pemerintah Kota Semarang, 2022).

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah yang tidak dikelola dengan baik yaitu terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Berbagai jenis sampah seringkali terlihat menumpuk pada sudut jalan. Kawasan dengan rob air laut dapat menimbulkan genangan-genangan air di beberapa titik. Hal tersebut juga dapat diperparah dengan sampah yang menumpuk ikut tergenang sehingga menjadikan air genangan menjadi keruh dan kotor. Permasalahan baru timbul dari pencemaran sampah, dimana lingkungan hidup yang tercemar dapat mengganggu kesehatan dari masyarakat. Beberapa waktu lalu, kawasan pesisir Kota Semarang yang berada di Muara Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) dihadapkan dengan permasalahan sampah plastik. Fenomena banjir yang diakibatkan karena sampah plastik terjadi ketika musim hujan yang disebabkan karena kiriman sampah plastik dari daerah lain.

Apabila sampah plastik tidak segera ditangani dengan baik, maka hal ini dapat mengancam ekosistem yang ada di laut. Diprediksi banyak ikan yang akan memakan maupun terjebak dalam sampah plastik. Fenomena tersebut disebabkan karena banyaknya sampah plastik yang dibuang di sungai kemudian berhenti di muara laut. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi

Pantai Maron Semarang yang memperlihatkan bahwa pantai ini didominasi oleh sampah plastik terbesar yaitu berupa *styrofoam*.

Beberapa sungai di Semarang yang memang belum dinormalisasi dengan baik. Sampah plastik tersebut tidak hanya berada pada satu titik, namun di sepanjang muara sungai hingga laut. Sebagian sampah tersebut telah terpendam di tanah dan sebagian lainnya masih mengambang dan tersangkut di bibir sungai. Hal ini berimbas terhadap hasil tangkapan para nelayan. Jika dihitung ketika banjir, sampah plastik yang datang ke laut dapat mencapai kurang lebih satu ton dalam sehari di muara sampai dengan hulu dengan sampah yang tidak terhitung jumlahnya.

Pada dasarnya pemerintah telah berupaya dalam menjaga kebersihan dan menangani masalah sampah dengan mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan sampah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini telah diatur terkait bagaimana pemerintah mengelola sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan cara pengurangan dan penanganan sampah yang lebih efektif. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Semarang sebagai upaya dalam melaksanakan pengelolaan sampah, dimana komitmen tersebut dapat dilakukan melalui legislasi daerah, mengingat bahwa permasalahan sampah di Kota Semarang sampai saat ini masih belum bisa ditangani dengan baik.

Melihat banyaknya permasalahan sampah terutama sampah plastik yang tidak kunjung terselesaikan, maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perwal Nomor 27 Tahun 2019 terkait Pengendalian Penggunaan Plastik. Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Perwal Semarang Nomor 27 Tahun 2019 yang dijadikan sebagai penguat dan batas produksi sampah pada tingkat hilir. Hadirnya Perwal Nomor 27 Tahun 2019 merupakan respon pemerintah terhadap kenaikan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Pemerintah kota mulai menerapkan kebijakan tersebut karena Kota Semarang masuk ke dalam daftar kota dengan produksi sampah terbanyak di Indonesia setelah Denpasar (Riyana Afila, 2022).

Tujuan dari adanya peraturan tersebut yaitu menjadi dasar hukum dalam pengendalian limbah plastik yang setiap hari jumlahnya semakin meningkat. Berdasarkan isi dari Perwal Nomor 27 Tahun 2019, bahwa setiap pelaku usaha dilarang menggunakan plastik, styrofoam, dan pipet plastik yang meliputi hotel, café, dan ritel modern. Upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian sampah plastic telah dilaksanakan dengan cukup baik dari segi teori maupun teknisnya meskipun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penggunaan kantong plastik dan pipet plastik yang marak digunakan di berbagai tempat makan di Kota Semarang, terlebih yang berada di café. Penerapan wadah belanja sebagai pengganti plastik hanya dilakukan di berbagai minimarket maupun supermarket, lain halnya dengan

UMKM seperti penjual makanan, café, dan restoran yang belum menerapkan hal tersebut. Sama seperti pasar tradisional yang masih belum menerapkan.

Jumlah sampah yang setiap harinya mencapai lebih dari 1.000 ton menjadikan TPA Jatibarang menjadi tidak layak lagi untuk dioperasikan. Di sisi lain, langkah untuk memperluas lahan TPA Jatibarang juga tidak mungkin untuk dilakukan karena topografinya yang curam. Dengan belum maksimalnya pengelolaan dan pengendalian sampah plastik yang ada di Kota Semarang, maka peran Pemerintah Kota Semarang perlu ditingkatkan lagi dengan mengacu kepada Perwal Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Tujuan dari adanya Perwal Semarang No. 27 Tahun 2019 yaitu untuk: a. Mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; b. Mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim; c. Menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. Mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan f. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga (Perwal Semarang No. 27 Tahun 2019, Pasal 2).

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk saja. Pembangunan yang baik perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan tersebut dengan kelestarian lingkungan. Isu lingkungan hidup dan pelestarian alam menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Konsep pembangunan

tersebut dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menghubungkan isu-isu pembangunan ekonomi dan stabilitas lingkungan dalam rangka mewujudkan “keberlanjutan”. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, serta iklim dan lingkungan. Indonesia menjadi salah satu negara PBB yang sepakat terkait adanya agenda *Sustainable Development Goals*.

Secara spesifik, permasalahan sampah menjadi sorotan dalam SDGs pada tujuan ke 11.6 dalam indikator 11.6.1.(a) Presentase sampah perkotaan yang tertangani. Indikator presentasi sampah perkotaan yang tertangani merupakan presentase jumlah sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan. Indikator ini digunakan dalam rangka meningkatkan jumlah penanganan sampah perkotaan untuk mengurangi dampak lingkungan serta mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan kota (Badan Pusat Statistik, 2017). Berdasarkan SDGs nomor 11, pengurangan sampah diutamakan sejak dari sumber, mempromosikan daur ulang, dan pengelolaan limbah yang aman serta terkendali dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang mendukung dalam pengelolaan sampah agar dapat mengurangi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan permasalahan sampah di Kota

Semarang. Sehingga pengelolaan sampah berkelanjutan diperlukan dalam mencapai berbagai target terutama pembangunan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Semarang untuk menjadi lebih baik?

1.3 Tujuan

Adanya penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Semarang untuk menjadi lebih baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan terkait kebermanfaatan mengenai pengelolaan dan pengendalian penggunaan sampah plastik.
- b. Sebagai referensi ataupun pijakan terhadap penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki kaitan dengan peningkatan kemampuan analisis masyarakat dan menjadi bahan kajian berlanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat menganalisis hubungan permasalahan dan rekomendasi penyelesaiannya melalui kebijakan publik.
- b. Dapat menambah informasi terkait pengelolaan dan pengendalian penggunaan sampah plastik.
- c. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan solusi bagi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan terkait pengelolaan sampah dan pengendalian penggunaan sampah plastik.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dan dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data pendukung yang dijadikan sebagai referensi yaitu terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini mengenai pengelolaan sampah. Meskipun terdapat

kesamaan dalam penelitian sebelumnya, tetapi penilitan ini mempunyai dimensi, ide, dan penjelasan yang berbeda. Adapun penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Fokus Penelitian	Teori dan Metode	Hasil
1.	Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi <i>Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1. 2020</i> Peneliti : Marsatana Tartila Tristy, Aminah	Mengetahui kebijakan pengurangan sampah plastic bagi kelestarian hidup di era globalisasi beserta efektivitasnya. Sehingga permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di era globalisasi dan efektivitas kebijakan pengurangan sampah plastic di era globalisasi.	Metode: yuridis normatif	Di era globalisasi seperti sekarang ini, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kebijakan dalam menanggulangi pengelolaan sampah. Meskipun demikian, beberapa opsi kebijakan penanganan sampah plastik yang diberlakukan justru dirasa belum atau

				<p>bahkan tidak efektif untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu untuk dikaji lebih dalam atau bahkan justru berpotensi untuk menimbulkan permasalahan baru terkait lingkungan. Sebagai contohnya seperti mengenai kebijakan penerapan kantong plastik yang berbayar yang harganya relative masih terjangkau.</p>
2.	<p>Determinan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus</p> <p><i>Journal of Public Policy and Management Review</i>, 11(2). 2022</p>	<p>Penelitian ini lebih melihat determinan (faktor-faktor yang mempengaruhi) implementasi pengelolaan sampah yang sinkron dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Hal ini dilihat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Administrasi Publik menurut (John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus, 2006:23) 2. Teori Kebijakan Publik menurut (Thomas R. Dye, 1987:1) 3. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut 	<p>Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dinilai sudah baik dilihat berdasarkan sumber daya yang tersedia dalam menunjang implementasi kebijakan</p>

	<p>Peneliti : Indri Puspita Sari, R. Slamet Santoso, Retna Hanani</p>	<p>berdasarkan banyaknya produksi sampah yang dihasilkan yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan persebarannya.</p>	<p>(Donald Van Meter dan Carl Van Horn, 2012:135)</p> <p>Metode: Kualitatif</p>	<p>pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dan lingkungan yang telah menunjang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus mempunyai kondisi yang baik. Selain itu sumber daya dan lingkungan mempunyai kaitan yang sangat kuat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.</p>
3.	<p>Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Kota Balikpapan</p> <p><i>Jurnal MODERAT, Vol. 7, No. 3. 2021</i></p> <p>Peneliti : Thalita Rifda Khaerani, Rosa Anggraeny, Muhammad</p>	<p>Permasalahan limbah plastik menjadikan pemerintah Kota Balikpapan menerapkan regulasi dan inovasi yang terus diperbaharui dalam rangka pengurangan penanggulangan sampah plastik di Kota Balikpapan. Hal ini dilakukan karena masih dominannya</p>	<p>1. Teori Kebijakan Publik menurut (Matei dan Bujac, 2016:763)</p> <p>2. Teori Inovasi menurut (Mulgan dan Albury, 2009:1)</p> <p>3. Teori Sampah menurut (Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 2006:3)</p> <p>Metode : Kualitatif</p>	<p>Inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Balikpapan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu 1. Menghasilkan peluang yang ditandai dengan adanya regulasi dalam inovasi pengurangan sampah plastik di Kota</p>

	<p>Gilang Akbar Ramadhan</p>	<p>masyarakat dan pelaku usaha yang mengabaikan kondisi lingkungan serta aturan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya inovasi pengurangan sampah plastic, dan menguraikan faktor-faktor penghambat inovasi pengurangan sampah plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.</p>		<p>Balikpapan. 2. Berkembang dan merancang ditandai dengan adanya kesadaran publik dengan melakukan sosialisasi melalui media elektronik berupa iklan layanan masyarakat. 3. Mereplikasi dan pengangkatan dimana terdapat kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan bagian hukum untuk melakukan pendekatan lebih kepada pelaku usaha terlebih dulu. Meskipun dalam proses inovasi masih terdapat faktor-faktor penghambat seperti masih adanya ritel-ritel yang masih menggunakan plastik sekali pakai dan tidak patuh regulasi.</p>
--	------------------------------	--	--	---

4.	<p>Analisis Implementasi Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik di Kota Semarang</p> <p><i>Journal of Politic and Governments Studies, 11(3). 2022</i></p> <p>Peneliti : Akyas Aryan Permana</p>	<p>Fenomena penumpukan sampah plastik yang terus terjadi dapat menggerus hak masyarakat dalam menggerus lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah Kota Semarang menekan laju sampah plastik dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019.</p>	<p>Teori Implementasi Kebijakan menurut (Wahab, 2008)</p> <p>Metode : Kualitatif</p>	<p>Secara umum implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 belum terlaksana dengan baik dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi yang didalamnya terkandung Standrat Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.</p>
5.	<p>Evaluasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik</p> <p><i>Journal of Politic and Governments Studies, 11(3). 2023</i></p> <p>Peneliti : Axell Matthew Kristiawan</p>	<p>Penelitian ini melihat kinerja dari implementor dalam mengendalikan penggunaan plastik.</p>	<p>Teori Evaluasi Kebijakan (William Dun, 2003:429)</p> <p>Metode : Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perwal ini masih banyak kekurangan yang ada. Pemerintah hanya melaksanakan satu pembinaan dari enam yang diamanatkan Perwal. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya formalitas belaka dengan</p>

				tidak diberikan pendampingan secara intensif, pengawasan lebih lanjut, dan solusi yang mutakhir kepada pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini berdampak kepada banyaknya penggunaan plastik oleh pelaku usaha.
--	--	--	--	--

Meskipun penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menganalisis lebih dalam terkait evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan cara menilai secara obyektif program-program yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 dalam rangka mengukur dampaknya bagi masyarakat serta melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut telah tercapai dengan melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Semarang. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada kondisi lingkungan hidup dengan dilatarbelakangi oleh teori SDGs dalam menunjang tujuan nomor 11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah usaha dalam mengadakan suatu informasi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang proses pengambilan kebijakan maupun perumusan kebijakan yang sudah ada sejak saat manusia mengenal adanya organisasi dan mengetahui arti keputusan. Subarsono (2005:2) dalam bukunya menulis bahwa menurut Thomas Dye (1981:1) mendefinisikan bahwa “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*” (kebijakan publik merupakan bentuk opsi dari pemerintah dalam melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu). Hal ini memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik pada dasarnya dibuat oleh pemerintah bukan swasta. Sehingga kebijakan publik berkaitan dengan opsi yang harus dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Soeharto (2008), kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang sifatnya terikat terhadap banyak orang dalam level strategis atau sifatnya garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Sedangkan menurut James Anderson (1970), kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan melalui badan dan pejabat pemerintah. Selain itu menurut William N. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pola ketergantungan yang bersifat kompleks berdasarkan pilihan-pilihan yang kolektif sehingga saling tergantung,

termasuk keputusan dalam tidak bertindak yang dibuat oleh badan maupun kantor pemerintah. Fermana (2009:32) mendefinisikan bahwa kebijakan mempunyai peran serta fungsi sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional, seperti :

- a. Kebijakan publik mudah untuk dihapami karena memiliki makna hal-hal yang dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik mudah untuk diukur karena parameternya jelas seperti sejauh apa kemajuan pencapaian cita-cita yang telah ditempuh.

Kebijakan publik merupakan sebuah studi terkait bagaimana, mengapa, dan apa dampak dari adanya tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah maupun kebijakan publik terkait studi yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil perbuatan tersebut, dan apa dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut (Fermana, 2009:34). Sedangkan menurut Thoah (2009:106-107), kebijakan pada satu pihak dapat berupa suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan menjadi salah satu cara atau teknik yang dapat mengatasi konflik dan menimbulkan insentif. Maka dari itu, kebijakan publik perlu diciptakan dengan adanya pertimbangan dan diimplementasikan dengan baik sehingga kebijakan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil (Fatih, 2010:2).

Terdapat tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno (2007:32-34) yaitu sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat memposisikan masalah pada agenda publik. Permasalahan ini sebelumnya berkompetisi terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam agenda kebijakan. Hingga akhirnya, beberapa persoalan masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Dalam tahap ini kemungkinan suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara permasalahan lainnya ditetapkan sebagai focus pembahasan, dan terdapat juga permasalahan karena alasan-alasan tertentu yang ditunda dalam waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Permasalahan yang sudah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Persoalan-persoalan tersebut didefinisikan agar kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut dilihat dari berbagai pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing agar dapat terpilih sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan. Pada tahap ini masing-masing aktor akan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari banyaknya alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para perumus kebijakan, hingga akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diangkat dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga maupun putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hingga akhirnya hanya akan menjadi catatan-catatan elit apabila program tersebut tidak diimplementasikan, dimana hal ini dijalankan oleh badan-badan administrasi ataupun agen-agen pemerintah pada tingkat bawah. Dalam tahap implementasi, berbagai kepentingan akan saling bersaing agar mendapatkan dukungan dari para pelaksana, meskipun beberapa hal lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang sedang dilaksanakan akan dinilai maupun dievaluasi dalam rangka menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat meraih dampak yang diinginkan atau tidak dengan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dari itu, ditentukan standar maupun kriteria yang dijadikan sebagai dasar dalam menilai apakah kebijakan publik yang dijalankan sudah mencapai tujuan ataupun dampak yang diinginkan atau belum. Adapun lima indikator yang dikembangkan oleh William Dunn terkait kriteria evaluasi, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Subarsono, 2011:126).

1.6.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah suatu mata rantai dari proses kebijakan Publik, menurut P. Lester dan Joseph Stewart, evaluasi kebijakan bertujuan untuk

melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan publik tersebut telah dilaksanakan untuk mencapai dampak yang diinginkan (James P. Lester & Joseph Stewart dalam Budi Winarno 165:23). Sehingga evaluasi kebijakan mempunyai tugas dalam menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang dihasilkan dari suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak serta menilai keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan dengan berdasarkan kepada standar maupun kriteria yang sebelumnya telah ditetapkan.

Menurut Briant & White (dalam Wibawa, 1994:63), evaluasi kebijakan pada hakikatnya harus dapat menjelaskan terkait sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang diungkapkan oleh Briant & White lebih mengarah kepada penilaian bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan dalam tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan.

Sementara menurut Rossi dan Freeman, evaluasi program harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada penelitian evaluasi, yaitu : desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) dan kegunaan program (dampak dan efisiensi). Selain itu, menurut Rossi & Freeman (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) bahwa evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi suatu program dengan menentukan nilai-nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dimana dengan kata lain hal yang paling penting saat membuat evaluasi kebijakan yaitu adanya

tujuan (*goals*) dan kriteria (*kriteria*). *Goals* merumuskan sasaran yang akan dicapai pada suatu kebijakan yang dinyatakan baik dalam global ataupun angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan sebelum itu dapat tercapai dan terpenuhi secara memuaskan.

Ndraha (2005:102) juga menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan beberapa model evaluasi, diantaranya yaitu :

- 1) Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, *treatment*) tolak ukur adalah *before*.
- 2) Model kelompok *das solen-das sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
- 3) Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes, yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

James Anderson dalam Winarno (2008:229) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe, setiap tipe evaluasi yang diperkenalkan ini berlandaskan kepada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi sebagai berikut :

- a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan fungsional. Apabila evaluasi kebijakan dipahami dengan kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Tipe evaluasi kedua adalah tipe evaluasi yang memiliki focus kepada cara bekerjanya suatu kebijakan maupun program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu terkait kejujuran maupun efisiensi dalam melakukan suatu program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis melihat secara obyektif program-program dengan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut, yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah tipe ketiga, yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis, dimana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dengan cara mencari tahu apakah kebijakan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada

tiga dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diwujudkan berupa rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan dan saran dari SDGs terintegrasi dan menyeluruh, serta bersifat global sehingga dapat diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas nasional yang kapasitasnya berbeda-beda serta tingkat pembangunannya, dan menghormati seluruh kebijakan dan prioritas nasional di setiap negara. Maka dari itu, negara memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pendekatan dan menyusun strategi secara menyeluruh antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, serta keberlanjutan lingkungan dengan senantiasa mengedepankan karakteristik dan prioritas nasional (United Nations, 2015: 3, 14; Badan Pusat Statistik, 2016: 3; Panuluh & Fitri, 2016: 11).

Terdapat tujuh belas tujuan global dalam mencapai *Sustainable Development Goals*, diantaranya sebagai berikut: 1) Tidak ada kemiskinan yang menjadikan seluruh dunia harus terbebas dari kemiskinan. 2) Tidak terjadi kelaparan, ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan mempertahankan budidaya pertanian berkelanjutan. 3) Seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang memadai tanpa memandang usia dan mendorong kesejahteraan hidup. 4) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas. 5) Kesetaraan gender. 6) Memastikan semua orang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. 7) Memastikan semua orang dapat mengakses sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern. 8) Pertumbuhan ekonomi dan

pekerjaan yang layak. 9) Industri dan infrastruktur berkembang pesat, berkualitas, penuh inovasi dan berkelanjutan. 10) Mewujudkan kesetaraan di seluruh dunia. 11) Membangun kota-kota dan pemukiman yang aman, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. 12) Konsumsi dan produksi yang terjamin. 13) Melakukan tindakan yang cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan antisipasi terhadap dampaknya. 14) Menjaga kelestarian laut dan mempertahankan eksistensi sumber daya laut demi perkembangan pembangunan berkelanjutan. 15) Menjaga kelestarian kehidupan di darat. 16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. 17) Menjalinkan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan (Lenkiewicz, Z. 2016).

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini berlandaskan pada SDGs nomor 11 karena mengutamakan pengurangan sampah sejak dari sumber, mempromosikan daur ulang, dan pengelolaan limbah yang aman serta terkendali dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang mendukung dalam pengelolaan sampah agar dapat mengurangi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan permasalahan sampah di Kota Semarang yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, terdapat target yang menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan teori SDGs nomor 11, yaitu pada poin 11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan suatu kota dan 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Seperti yang diketahui bahwa penanganan perubahan iklim merupakan suatu tindakan yang dilakukan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Hal tersebut telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 terkait Pengendalian Penggunaan Plastik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan dari adanya Perwal tersebut yaitu untuk mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam operasionalisasi konsep, peneliti menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Operasionalisasi Konsep

Teori	Konsep/Tahapan	Indikator
Evaluasi Kebijakan (James Anderson, 2008:229)	<p>Evaluasi Kebijakan Sistematis</p> <p>Melihat secara obyektif program-program kebijakan dengan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Tujuan-tujuan tersebut mengacu pada tujuan yang telah tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.</p>	<p>1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengendalian penggunaan plastik</p> <p>2. Mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis</p>

		<p>sampah rumah tangga Memastikan bahwa terjadi penurunan volume sampah rumah tangga</p> <p>3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Mengevaluasi peran serta dari masyarakat yaitu pelaku usaha terhadap partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik</p> <p>Melihat sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dalam mencapai tujuan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih baik.</p>
<p><i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i></p>	<p>Berdasarkan tujuan SDGs 11.6, pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberikan perhatian</p>	<p>1. Proporsi limbah padat perkotaan dengan pemrosesan akhir yang baik</p> <p>Pengadaan TPS (Tempat Penampungan</p>

	khusus terhadap kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	<p>Sementara) dibawah naungan aparat di masing-masing kecamatan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah yang akan masuk ke TPA Jatibarang.</p> <p>2. Persentase sampah nasional yang terkelola</p> <p>Mengurangi jumlah timbulan sampah di Kota Semarang.</p>
--	---	--

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan proses yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan berdasarkan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistic dengan menggunakan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan

dalam menggambarkan fakta maupun keterangan-keterangan yang ada di lapangan, sedangkan deskriptif yaitu sifat data penelitian kualitatif dimana bentuk datanya berbentuk deskripsi objek penelitian seperti kata-kata, angka yang tidak dihasilkan oleh pengolahan statistika, dan gambar.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini yaitu karena metode kualitatif memiliki sifat *elaborative*, dimana penelitian kualitatif dapat membantu peneliti dengan mudah dalam memperoleh informasi secara mendalam berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat oleh peneliti. Hal ini juga dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh bisa digunakan dalam menjawab rumusan masalah serta menentukan tujuan dari penelitian yang diangkat. Dengan menggunakan metode penelitian berupa kualitatif deskriptif, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat implikasi kebijakan pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (DLH) yang beralamat di Jalan Tapak Raya, Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50151. Lokasi tersebut digunakan oleh peneliti guna memperoleh data dan informasi-informasi yang diperlukan untuk penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada implikasi adanya kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang, dimana data-data dan informasi tersebut dapat ditemukan di DLH Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian mempunyai peran dalam memberikan tanggapan maupun informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai data dengan memberikan masukan kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek penelitian atau responden inilah yang disebut dengan informan. Informan yang akan dipilih dan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Bidang 2 Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Bidang 4 Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

1.8.4 Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil oleh peneliti secara langsung tanpa menggunakan perantara, sehingga data yang diperoleh berupa data mentah. Data primer dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kota. Selain itu sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan teknik wawancara, dimana informan yang dipilih peneliti yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung ke lapangan dan data diambil dari data yang telah diterbitkan oleh sumber lain. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur.

Penulis memperoleh data sekunder dari berbagai macam sumber seperti media cetak atau elektronik seperti sebuah catatan, foto, internet, dan media lainnya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui dua tahap. Teknik pengumpulan data pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti mencari berbagai macam literatur dengan topik yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini melalui buku, jurnal, dan artikel yang tersedia di internet. Hal ini bertujuan agar dapat memperkaya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari kekurangan yang ada apa penelitian sebelumnya dalam rangka memperkaya dan menjawab permasalahan yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yang kedua yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian kualitatif. Tujuan dari wawancara yaitu agar dapat mengetahui apa yang ada di pikiran dan hati seseorang mengenai pandangannya terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh peneliti melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber dimana isi dari pertanyaan dan strukturnya telah ditentukan, dirancang, dan ditulis oleh

peneliti. Narasumber atau informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu :

- a) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Bidang 2 dan Bidang 4
- b) Pelaku usaha (Café dan pedagang kecil)
- c) LSM Bina Karta Lestari (BINTARI)

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang telah didapatkan dan memilih data yang ada. Dalam penggunaan teknik ini, dapat ditemukan informasi masa lalu yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa studi pustaka dan foto dari narasumber ketika memberikan informasi. Dokumentasi dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lengkap, sehingga penjelasan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian ilmiah dan kredibel.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan jika data empiris yang didapatkan berupa data kualitatif yang merupakan gabungan dari kata-kata dan bukan rangkaian angka sehingga tidak bisa dirangkai dalam bentuk kategori-kategori maupun struktur klasifikasi. Teknik analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan berdasarkan aneka macam cara seperti observasi, wawancara, dan kajian pustaka yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan artikel yang

tersedia di internet. Kegiatan analisis terdiri berdasarkan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Ulber Silalahi, 2009:339). Berdasarkan hasil data tersebut kemudian dapat diperoleh kesimpulan. Berikut penjelasan dari tiga tahapan tersebut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berjalan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Dalam tahap ini juga dilakukan kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat bagian-bagian. Proses ini akan terus berlangsung sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

2) Penyajian Data

Langkah penting yang dilakukan dalam kegiatan analisis data kualitatif selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sehingga penelitian kualitatif memiliki penyajian data yang dapat dilakukan berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya.

3) Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan tersebut didukung oleh adanya bukti-bukti dari data yang valid dan konsisten yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, sehingga kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.2.2 Kualitas Data

Kualitas data dengan triangulasi dan menggunakan bahan referensi dalam penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data. Menurut Wiliam Wiersma (1986) triangulasi dalam pengajuan kredibilitas merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273). Dengan meningkatkan keabsahan data, maka peneliti membaca berbagai referensi, hasil penelitian terdahulu, buku, dan artikel-artikel terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang sudah diperoleh. Sehingga data-data yang diperoleh akan lebih valid.